



Wakil Gubernur Kaltara, Christiady Sanjaya berserta Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Dr. H Rizal Djali, usai kegiatan Forum Ilmiah di Audit Unpad Bandung. FOTO : ist.

Regulasi Lemah, Infrastruktur tak Mendukung

Borneo Tribune, Bandung

Implementasi kebijakan keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan Politik Otonomi Pasca reformasi belum sepenuhnya dapat mendukung tercapainya tujuan Otonomi, yaitu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Permasalahan utama dalam implemtasi kebijakan keuangan daerah adalah regulasi yang masih lemah, infrastruktur daerah yang belum mendukung peningkatan perekonomian daerah, dan sumber daya manusia yang belum memadai," kata Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Dr. H Rizal Djali, Rabu (19/3) pada acara Forum Ilmiah "Implementasi Kebijakan Keuangan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Politik Otonomi Pasca Reformasi". Graha Sanusi Hardjadinata (Aula Unpad), Bandung.

....Ke Halaman -11



Regulasi Lemah, Infrastruktur Tak Mendukung

Dikatakannya, Kebijakan Pemerinta pusat khususnya terkait dengan penataan penempatan alokasi dana perimbangan juga belum sepenuhnya mendukung aspek pemerataan, serta kebijakan Daerah Otonomi baru belum memberikan dampak positif bagi pemerataan pembangunan, malah menimbulkan masalah baru. "Kebijakan Pemerintah yang bersifat khusus, seperti otonomi khusus belum sepenuhnya dapat menyelesaikan masalah utama sebelum otonomi khusus tersebut diberikan," jelasnya.

Kondisi di atas, masih menurutnya, jika dibiarkan akan sangat berpengaruh bagi infrastruktur, pening-

katan perkonomi daerah, dan kualitas SDM dimilikinya juga dengan sebaiknya. Permasalahannya diperberat dengan maraknya penyimpangan di bidang keuangan daerah, bahkan melibatkan kepada daerah.

Dr.H Rizal Djaliil mengulas, perbaikan-perbaikan, seperti, pengatutan kembali alokasi transfer yang lebih berkeadilan untuk mendukung peningkatan kapasitas kemampuan keuangan daerah sehingga pembangunan di daerah dapat dilakukan percepatan. Optimalisasikan kegiatan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, efisiensi belanja-belanja pemerintah daerah, perbaikan regulasi pengelolaan

keuangan daerah yang meminimalkan penyimpangan oleh pejabat pengelola keuangan daerah serta memperjelas ketentuan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan pejabat pengelola keuangan, perbaikan manajemen pengelolaan keuangan, dan perbaikan manajemen SDM pemerintah daerah, meliputi penataan kembali pegawai-pegawai dalam organisasi pemerintah daerah sehingga tidak membebani belanja daerah melalui mekanisme perampingan pegawai serta memperbaiki mekanisme analisis jabatan sesuai jenjang karir dan kompetensi Pegawai.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar Christiandy

Sanjaya yang hadir pada acara tersebut mengatakan, apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada H Rizal Djaliil, apa yang menjadi harapannya mungkin bisa ditindak lanjuti, karna banyak kaitan dengan kebijakan dipemerintah pusat, yang berkaitan dengan regulasi.

"Pemerintah di daerah lebih bisa dan mudah untuk melaksanakannya. permasalahan dana Bansos, ini menjadi salah satu contoh, dan perhatian kita bersama, bahwa masih adanya kelemahan-kelemahan, yang akhirnya berujung dengan kasus. dari hal ini kita berharap, segala kebijakan, dan peraturan untuk lebih lagi diperjelas lagi. (Lay) □